

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

EMILDA IHSANTI
NIM : 57722/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

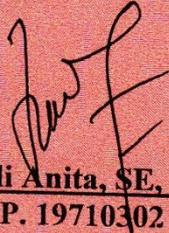
**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi empiris Pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)

Nama : EMILDA IHSANTI
NIM/TM : 57722/2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2014

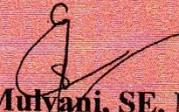
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19781204 200801 2 001

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

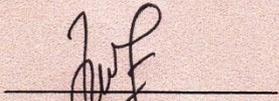
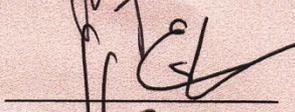
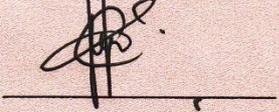
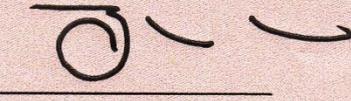
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi empiris Pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)**

Nama : EMILDA IHSANTI
NIM/TM : 57722/2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2014

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	
2	Sekretaris	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	
3	Anggota	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
4	Anggota	Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Emilda Ihsanti
NIM/Tahun Masuk : 57722/2010
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Jati/16 Juli 1987
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Taruko I Blok T No. 4 Padang
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/Skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Prodi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena Karya tulis/Skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Maret 2014
Yang Menyatakan



Emilda Ihsanti
57722/2010

ABSTRAK

Emilda Ihsanti (2010/57722). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala bagian dan staf akuntansi pada masing-masing SKPD maka didapat responden sebanyak 78 orang responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yang bersangkutan. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *SPSS 15*.

Kesimpulan penelitian menunjukkan: pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,669 > 1,666$. Nilai koefisien dari variabel pengetahuan akuntansi (X_1) adalah 0,335 ini berarti bahwa meningkatnya kompetensi SDM satu satuan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah 0,335 satuan dan bentuk pengaruh X_1 . Penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,826 < 1,666$. Nilai koefisien dari variabel kualitas informasi akuntansi (X_2) adalah 0,073 ini berarti bahwa meningkatnya penerapan SAKD satu satuan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah 0,073 satuan dan bentuk pengaruh X_2 .

Saran bagi penelitian ini adalah: 1) Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan agar laporan keuangan daerah yang dihasilkan dapat lebih baik. 2) Instansi perlu meningkatkan penerapan SAKD untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Keywords: HR Competency, Application SAKD, Quality of Financial Statements area

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, allahumma sholi'alamuhammad waala alimuhammad.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Yunia Wardi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak/Ibu Pembantu Dekan.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Prodi dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Prodi Akuntansi
3. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak dan Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak selaku penguji, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

4. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawati yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.
5. Orang tua tercinta, Papa Masrial, BA dan Mama Ismiati. AM, BA yang memberikan perhatian, do'a, kasih sayang, dorongan dan pengorbanan yang tidak ada putus-putusnya hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Kakak-kakak tersayang, Aulia Rahmi, SE dan Latifah Rahmi, S.Pd.I terimakasih buat do'a dan supportsnya.
7. Teman-teman kelas transfer 2010 yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	9
1. Kualitas Laporan Keuangan.....	9
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	18
3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	21
4. Penelitian Terdahulu.....	28
5. Hubungan Antar Variabel untuk Pengembangan Hipotesis..	29
B. Kerangka Konseptual.....	31
C. Hipotesis Penelitian.....	32

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Pengukuran Variabel dan Instrumen Penelitian.....	36
F. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	37
G. Uji Asumsi Klasik.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	40
I. Definisi Operasional.....	44

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
B. Demografi Responden.....	47
C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	50
D. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	54
E. Uji Asumsi Klasik.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	59
G. Pembahasan.....	63

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Keterbatasan.....	69
C. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	31

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD di Kab. Lima Puluh Kota	34
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	37
3. Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	46
4. Karakteristik Reponden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
5. Karakteristik Reponden Berdasarkan Usia	48
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	48
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	49
8. Tingkat Capaian Responden Kualitas Laporan Keuangan Daerah	50
9. Tingkat Capaian Responden Kompetensi SDM	52
10. Tingkat Capaian Responden Penerapan SAKD.....	53
11. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil.....	55
12. Hasil Uji Reliabilitas.....	56
13. Uji Normalitas.....	57
14. Uji Multikolinearitas.....	58
15. Uji Heteroskedastisitas.....	59
16. Uji Koefisien Determinasi.....	59
17. Koefisien Regresi Berganda.....	60
18. Uji F Statistik.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabulasi Data.....	74
2. Hasil Olahan Data.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Reformasi aspek keuangan negara baik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pun berlaku dengan keluarnya UU No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada UU No. 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 31 disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No. 24 tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP No. 71 tahun 2010) antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan,

dan dapat dipahami. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Celviana (2010) keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Safrida (2010) laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peranan internal audit. Sedangkan menurut Desi (2007) keterandalan pelaporan keuangan dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk

menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Devi : 2011).

Belum tertibnya pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain unsur kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Nasaruddin (2008) “sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan”.

Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan dihasilkan (Bastian, 2007). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pemdapun memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sistem tersebut dinamakan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem ini dilaksanakan dengan suatu Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) yang terintegrasi dengan sistem-sistem lain dalam manajemen keuangan daerah.

SAKD merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemda yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang disusun berdasarkan

Standar Akuntansi Pemerintah (Mahsun, 2006). Sistem akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya (Bastian, 2007).

Penyusunan laporan keuangan daerah yang berpedoman pada SAKD ini sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud juga mampu meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Jeleknya pengelolaan keuangan daerah salah satunya disebabkan oleh penerapan SAKD yang dianggap masih lemah dan belum seragam pada setiap daerah sehingga meningkatnya peluang terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Hilda : 2010).

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Pemendagri No. 59 Tahun 2007). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, ketika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan dengan baik maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Salah satu cara melihat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan telah sesuai dengan kualitas informasi yang diharapkan, maka dapat dilihat dari opini auditor. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2007 sampai tahun anggaran 2012 memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ini berarti tidak ada peningkatan opini dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.

Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain minimnya kualitas sumber daya manusia, belum maksimalnya kualitas informasi yang digunakan dalam LKPD, lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, lemahnya struktur pengendalian intern dan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan (www.bpk.go.id). Meski demikian pemda harus berusaha meningkatkan SDM yang dapat menyusun LKPD

yang sesuai dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Celviana (2010) meneliti tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian Safrida, Nadirsyah, dan Usman (2010) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Banda Aceh.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dimana penelitian sebelumnya membahas tentang pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sedangkan pada penelitian sekarang membahas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya fokus pada pengaruh sumber daya manusia studi empiris di Pemda Subosukawonosraten sedangkan penelitian sekarang fokus pada pengaruh

kompetensi sumber daya manusia studi empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota.

Berdasarkan penjelasan diatas, Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas informasi yang di hasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasan Peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah karena Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu daerah yang mendapatkan opini WDP enam kali dalam beberapa tahun belakang, yaitu pada tahun 2007 dan tahun 2012 yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai:

1. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi Akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai kualitas laporan keuangan daerah.
3. Bagi Peneliti lainnya, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 dalam Ratih (2010) tujuan laporan keuangan adalah:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Mardiasmo (2002) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi/unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa dimasa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan entitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan entitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No. 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, diantaranya: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir.

3. Neraca

Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut: pendapatan laporan operasional kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit laporan operasional.

5. Laporan Arus Kas

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus

kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan pada periode sebelumnya.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya: ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menyajikan pengungkapan penjelasan yang tidak dimuat pada 3 laporan di atas, seperti metode penyusutan, metode yang dipakai dan lainnya.

d. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Menurut Suwardjono (2005), merumuskan kualitas spesifik pelaporan keuangan dalam dua kategori yaitu kualitas primer beserta unsur-unsurnya dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan atau keterpautan atau relevansi dan keterandalan atau reliabilitas, dan ketepatan penyimbolan. Unsur keterpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatanwaktuan. Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifiabilitas. Kualitas sekunder adalah keterbandingan, konsistensi, dan kenetralan.

Sedangkan menurut Hongren, Harrison, Robinson, dan Secokusumo dalam bukunya Akuntansi di Indonesia yang diterjemahkan oleh Maudy Warouw (1998) menyatakan bahwa agar dapat digunakan dalam pembuatan keputusan, informasi akuntansi tersebut haruslah relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan.

Dalam PP No. 24 tahun 2005, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut hampir sama dengan karakteristik laporan keuangan yang tercantum dalam PSAK tahun 2004. Berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP No. 71 tahun 2010:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi dimasa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memiliki karakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dari paparan di atas dapat kita menilai bagaimana seharusnya laporan keuangan yang mempunyai kualitas yang baik, apakah telah memenuhi karakteristik kualitatif atau belum. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan itu sendiri.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Ukuran kompetensi SDM dapat dilihat dari rata-rata pendidikan, pelatihan, dan tingkat pengalaman (Griffin, 2004) yaitu:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk membudayakan manusia itu sendiri. Pendidikan dapat dibagi menjadi; pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal.

b. Pelatihan

Menurut Rivai (2005), pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan dapat mengajarkan keahlian yang diperlukan baik untuk pekerjaan saat ini maupun masa mendatang.

c. Pengalaman

Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan memiliki pengalaman seseorang akan terbiasa melakukan sesuatu pekerjaan lebih terampil, punya wawasan yang luas dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Pengalaman tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan saja, pengalaman juga memberikan kontribusi yang cukup terhadap kemampuan seseorang dalam menangani sebuah pekerjaan. Menurut Dessler (2003), pengalaman dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan.

Menurut Warsoko (2007) kemampuan (ability) merupakan salah satu unsur penting dalam masalah manajemen dan kepemimpinan, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Kemampuan berhubungan dengan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja atau produktivitas tenaga kerja,

dalam artian sejauh mana seseorang dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari kecakapan atau kemampuan yang dimiliki.

Sedangkan Nitisemito (1996) kemampuan merupakan keterpaduan dari unsur antara lain : pendidikan, kedisiplinan, bakat, kesehatan, keselamatan kerja, dan pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja sangat berkaitan dengan kemampuan seseorang atau pengalaman kerja akan meningkatkan kemampuan yang dimiliki.

Pelatihan sebagai salah satu komponen dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu untuk diberikan kepada tenaga kerja. Pelatihan akan memberikan dasar-dasar kerja secara fundamental atau mendasar dari suatu deskripsi kerja yang dibebankan. Agus dalam Soetanto (2007) pelatihan teknis merupakan upaya pembinaan keterampilan dasar yang diperlukan pegawai baru atau lama untuk melaksanakan pekerjaan.

Berkaitan dengan pengalaman kerja, kemampuan kerja, dan pelatihan yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja, lama waktu penugasan menentukan tingkat kualitas tenaga kerja itu yang mana mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Menurut Widjajanto (2001) kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Pendidikan yang rendah dapat diisi oleh pengalaman yang panjang. Meskipun dalam beberapa jenis pekerjaan, pengalaman mutlak diperlukan. Unsur akhlak sangat diperlukan untuk posisi-posisi jabatan yang berkaitan langsung dengan harta perusahaan, dan pimpinan yang berwenang dalam pengambilan keputusan.

Menurut Havesi, 2005 (dalam Indriasari, et al. 2008) kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Perkembangan akuntansi keuangan daerah – akuntansi sektor publik pada penerbitan manual keuangan daerah 2001 telah menuju ke arah positif. Komite standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah telah menyetujui orientasi ke International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dengan strategi masa transisi. Persetujuan ini merupakan tanda pengakuan bahwa pelaporan keuangan berbasis IPSAS ini dapat diterima. Dan sistem akuntansi keuangan daerah – akuntansi sektor publik ini juga berpedoman pada standar akuntansi daerah (Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2005) atau prinsip akuntansi berterima umum (PABU).

Sedangkan menurut Nordiawan (2008) mendefenisikan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut : “suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa SAKD merupakan suatu prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan daerah.

b. Tujuan SAKD

Sistem akuntansi pemerintahan (sektor publik) memiliki tiga tujuan pokok (Nordiawan, 2008) yaitu:

1. Pertanggung jawaban

Akuntansi pemerintah harus memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab pada operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggung jawaban tersebut mengandung implikasi bahwa akuntansi pemerintahan seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode bersangkutan.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Tujuan manajerial ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan tingkat atas dan menengah dapat mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau menyusun perencanaan masa yang akan datang.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

c. Ruang Lingkup SAKD

Salah satu tujuan SAKD adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggung jawabkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak eksternal. Pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemda baik secara langsung maupun tidak langsung disebut sebagai stakeholders yang meliputi:

1. DPRD

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemda untuk mengelola keuangan daerah.

2. Badan Pengawas Keuangan

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemda, yang mana yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Investor, kreditor, dan donator

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

4. Analisis ekonomi dan pemerhati pemda

Adalah pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemda seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, konsultan, dan LSM.

5. Rakyat

Rakyat disini merupakan kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemda atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

6. Pemerintah pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemda untuk menilai pertanggung jawaban gubernur sebagai wakil pemerintah dari daerah (pasal 2 PP No. 108/2000).

7. Pemda lain (provinsi, kabupaten/kota)

Pemda saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam melakukan pinjaman (penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf e PP No. 107/2000 tentang pinjaman daerah).

d. Karakteristik SAKD

SAKD atau Sitem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki beberapa karakteristik (Nordiawan, 2008), diantaranya:

1. Basis Akuntansi

Dalam hal ini, sistem akuntansi pemerintah menggunakan dua basis akuntansi yaitu basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening kas daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

2. Sistem pembukuan

Sistem pembukuan pada pemerintah menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain. Menurut Permendagri No. 59 tahun 2007 mengenai akuntansi keuangan daerah dimana sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi prosedur pengelolaan kas, prosedur pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.

e. Penerapan SAKD

Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PP ini menginstruksikan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya. PP ini selanjutnya terus diperbaharui dengan di keluarkannya PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah menerbitkan Peraturan No. 13 Tahun 2006 yang memuat pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam

Negeri. Salah satunya adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Permendagri No. 13 tahun 2006 ini merupakan penyempurnaan dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang memuat pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SAKD merupakan penyempurnaan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan sistem akuntansi berbasis kas modifikasian yang mengarah kepada basis akrual (*accrual basis*). Disamping itu penerapan SAKD juga ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat, dan komprehensif sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2004), SAKD dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Selanjutnya menurut Halim (2002), implementasi sistem akuntansi di daerah dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Untuk kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri

Penerapan sistem informasi keuangan daerah harus lebih ditekankan pada pencapaian visi dan misi dari daerah itu sendiri. Untuk

menyediakan segala kebutuhan informasi keuangan di daerah yang baik perlu didukung oleh seperangkat komputer dengan segala pendukungnya.

2. Untuk kebutuhan pemerintah yang lebih tinggi

Disamping untuk kebutuhan daerah, masing-masing sistem informasi diharapkan juga dapat memberikan data mengenai daerahnya kepada pemerintah pusat dengan cepat, akurat, dan up to date sehingga tugas pemerintah pusat sebagai pengendali akan lebih mudah menjalankannya.

3. Untuk kepentingan masyarakat umum sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemerintah di daerah.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Desi (2007) meneliti tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Celviana (2010) meneliti tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian Safrida, Nadirsyah, dan Usman (2010) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Banda Aceh.

5. Hubungan Antar Variabel untuk Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Havesi, 2005 (dalam Indriasari, et al. 2008) kompetensi merupakan suatu karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan.

Penelitian Devi (2011), menjelaskan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Apabila kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia terutama bagian keuangan sudah kompeten maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan begitu juga sebaliknya, apabila sumber daya manusia yang dimiliki tidak kompeten terutama bagian keuangan maka akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak berkualitas.

2. Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Mulyadi (2001) mengkaitkan tujuan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2004).

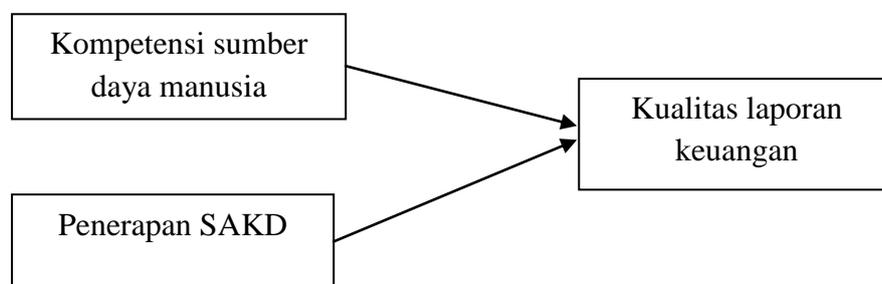
Hal ini sejalan dengan pendapat Darise (2008) yang menyatakan bahwa keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam perhitungan anggaran juga sangat rendah karena sistem akuntansi yang diselenggarakan belum didasarkan pada standar akuntansi dan tidak didukung oleh perangkat data dan proses yang

memadai. Penelitian yang dilakukan Hilda (2010), menyatakan bahwa penerapan SAKD berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Apabila penerapan SAKD pada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan begitu juga sebaliknya, apabila penerapan SAKD tidak sesuai dengan aturannya maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak bagus.

B. Kerangka Konseptual

Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini mencoba mencari kejelasan tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hubungan antar-antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₂ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kompetensi SDM dan penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Kompetensi SDM dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kab. Lima Puluh Kota. Semakin berkompeten SDM yang ada maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Agar laporan keuangan dapat dibuat dengan baik maka diperlukan pegawai yang memahami akuntansi, pengalaman dan pelatihan yang memadai dibidang akuntansi serta pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat.
2. Penerapan SAKD dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kab. Lima Puluh Kota. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan pegawai di bidang keuangan dalam menyusun laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

B. Keterbatasan

Penelitian ini hanya menguji pengaruh kompetensi SDM dan penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dari hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa pengaruh kompetensi SDM dan penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan daerah hanya sebesar 18,6%, sedangkan 81,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

C. Saran

Penelitian ini mampu membuktikan secara empiris bahwa kompetensi SDM dan penerapan SAKD berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis data dan pembahasan, kompetensi SDM mendukung kualitas laporan keuangan daerah. Namun, kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan agar laporan keuangan daerah yang dihasilkan dapat lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel distribusi frekuensi kompetensi SDM yang masih ada beberapa item pernyataan yang masih rendah. Untuk mengoptimalkan laporan keuangan daerah yang berkualitas ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya pemerintah daerah memberikan pelatihan sebagai salah satu komponen dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu untuk diberikan kepada tenaga kerja.

2. Dari hasil analisis data dan pembahasan, penerapan SAKD belum mendukung kualitas laporan keuangan daerah. Namun jika dilihat dari distribusi frekuensi, maka dapat dilihat bahwa instansi perlu meningkatkan penerapan SAKD untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi serta memotivasi penelitian lain untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertibangkan keterbatasan-keterbatasan yang masih terdapat dalam penelitian.
4. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan sampel yang lebih banyak lagi sehingga kemampuan generalisasinya untuk memperlihatkan kualitas laporan keuangan menjadi kuat.
5. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bastian, Indra 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Erlangga
- Emillyza, Rinda. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)*. Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang. (Tidak dipublikasikan)
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, BP UNDIP, Semarang.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Harifan, Handriko. 2009. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)*. Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang. (Tidak dipublikasikan)
- Havesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. www.osc.state.ny.us
- Hilda, Erfina. 2010. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Padang)*. Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang. (Tidak dipublikasikan)
- Indriasari, Desi. 2007. *Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Symposium Nasional Akuntansi XI
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nitisemito, A.S. 1996. *Manajemen Personalialia (Manajemen Sumber Daya Manusia)*. Cetakan kesembilan. Edisi ketiga. Ghalia Indonesia

- Nordiwan, Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah*
- , Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- , Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*
- , Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- , Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang *Pedoman dalam Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*
- , Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Roviyantie, Devi. 2011. *Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya)*
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta
- Wahyuni, Asnita. 2011. *Pengaruh Penggunaan TI, Keahlian Pemakai dan Keterlibatan Pemakai terhadap Efektifitas Penerapan SIA*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNP
- Warsoko, Soesanto. 2007. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi pada Implementasi Basis Data PFAMS*. Padang: Jurnal FE UNAND. Volume 11. No. 4
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- Winidyaningrum, Celviana. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII

www.bpk.go.id. *Opini Wajar Dengan Pengecualian Hasil Pemeriksaan BPK RI. Kabupaten Lima Puluh Kota*. Akses tanggal 01 Juni 2013

Yuliani, Safrida. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*